

PEMANTAUAN KINERJA SATU TAHUN KPK

// 2020

Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi



Transparency
International
Indonesia

Indonesia
Corruption
Watch

Apa yang dipantau?

Arah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi

Implikasi Revisi Undang-Undang KPK

Kinerja Sektor Penindakan

Kinerja Sektor Pencegahan

Kinerja Internal Organisasi

Kinerja Monitoring Penyelenggaraan

Pemerintahan Negara

Arah Politik Pemberantasan Korupsi

- Disorientasi penguatan KPK
- Menitikberatkan kepentingan investasi
- Minim regulasi pro-pemberantasan korupsi



Sumber:

<https://www.covesia.com/assets/foto/berita/20190916015322.jpg>

Implikasi Revisi UU KPK



Sumber: https://mmc.tirto.id/image/otf/700x0/2019/09/07/pegawai-kpk-tolak-revisi-uu-kpk-antara_ratio-16x9.jpg

Kooptasi independensi
KPK sebagai bagian dari
Eksekutif

Kewenangan Dewan
Pengawas

Kebutuhan penguatan
fungsi pencegahan tidak
terjawab

Kinerja Sektor Penindakan

1 Menurunnya jumlah tangkap tangan

2 Ketidakjelasan penuntasan tunggakan perkara

3 Kegagalan meringkus buronan

4 Problematika supervisi & pengambilalihan perkara

5 Nihil menjerat penegak hukum

Kinerja Sektor Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

1

Penanganan pandemi
Covid-19: Bansos

3

Kenaikan premi BPJS
Kesehatan

5

Konflik Kepentingan Stafsus
Presiden

2

Kartu Pra-Kerja

4

Pilkada Serentak

Kinerja Sektor Pencegahan

1

Fungsi *trigger mechanism* ke APH tidak optimal

2

Korsupgah ke Pemerintah Daerah bersifat teknis-administratif

3

Program pencegahan korupsi di sektor strategis stagnan

4

Pelaksanaan Stranas PK cenderung birokratik

5

Struktur organisasi baru berpotensi menghambat kerja pencegahan

Kinerja Sektor Internal Organisasi

1

Abai perlindungan pegawai

2

Potensi maladministrasi pengembalian penyidik

3

Kental dengan gimik politik

4

Polemik rencana kenaikan gaji Komisioner & pembelian mobil dinas

5

Perlakuan khusus ke Saksi & Tersangka

6

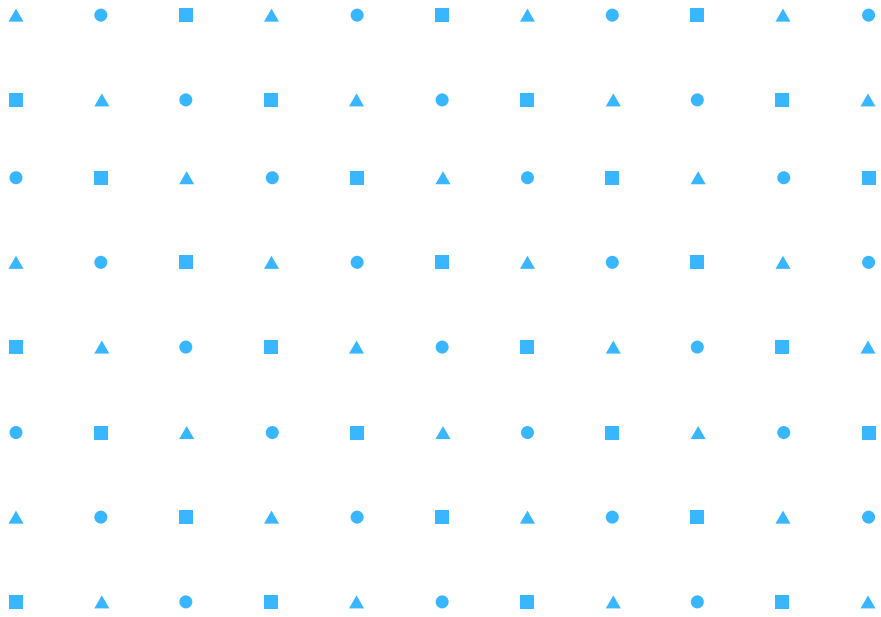
Melontarkan pernyataan kontroversial

7

Robohnya penegakan etik

8

Pertentangan struktur kelembagaan baru



Rekomendasi

Presiden dan DPR

Sektor Penindakan

Sektor Pencegahan

Internal Organisasi

Monitoring Pemerintahan

Sumber:: https://mmc.tirto.id/image/otf/953x536/2019/09/07/aksi-tolak-revisi-uu-kpk-tirto-mico-1_ratio-16x9.jpg dan

Presiden & DPR

- Presiden harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang guna mengembalikan regulasi kelembagaan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
- Pemerintah dan DPR harus segera membahas dan mengundang RUU Perampasan Aset, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai;

Sektor Penindakan

- KPK harus memaksimalkan upaya penindakan, baik dilakukan dengan metode tangkap tangan maupun *case building*;
- Mengevaluasi strategi pencarian lima buronan yang tersisa;
- Melanjutkan penanganan perkara yang selama ini menjadi tunggakan di KPK;
- Memaksimalkan fungsi supervisi dan pengambilalihan perkara yang stagnan di penegak hukum lain;

Sektor Pencegahan

- Strategi pencegahan harus masuk mengintervensi korupsi di sektor politik;
- Mendorong kerja penindakan dan pencegahan yang terintegrasi;
- Memastikan fungsi *trigger mechanism* dilaksanakan lebih optimal ke APH dan Pemerintah Daerah
- Mengakselerasi program pencegahan korupsi di sektor strategis, terutama sektor politik, swasta, sumber daya alam (SDA);
- Membuka dan melibatkan publik dalam penyusunan Aksi PK 2021-2022 secara maksimal;
- Mengembangkan mekanisme kepatuhan rekomendasi internal KPK;

Internal Organisasi

- Meminimalisir gimik politik di tengah situasi pelik pemberantasan korupsi;
- Menjamin adanya perlindungan kepada Penyelidik atau pun Penyidik yang sedang menjalankan tugas;
- Mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan kebijakan;
- Meningkatkan secara serius partisipasi masyarakat dalam setiap seleksi pejabat internal;
- Segera menyelesaikan Rencana Strategis KPK 2019-2023 secara inklusif dan partisipatif;

Monitoring Pemerintahan

- Mendorong upaya yang lebih terintegrasi dalam melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan Negara
- KPK perlu responsif terhadap isu-isu aktual Pemerintahan, baik di Pusat hingga di Daerah
- Meningkatkan kualitas monitoring dan rekomendasi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

 Indonesia

the global coalition against corruption



www.ti.or.id | www.antikorupsi.org